

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus deras globalisasi sedang melanda seluruh dunia. Hal ini tentu memberikan dampak yang beragam bagi kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Menurut H. A. R. Tilaar, tentunya individu akan berada di dalam situasi kebingungan karena dia menghadapi dunia yang sedang berkembang dengan cepat.¹

Mungkin Eddy Wibowo seperti dikutip oleh Prayitno menyatakan bahwa secara umum, kondisi kehidupan kita sekarang dapat digambarkan sebagai berikut:

Kita sekarang hidup dalam dunia yang kompleks, sibuk, terus berubah, dan penuh tantangan untuk mencapai perkembangan diri yang optimal, kemandirian, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Di dunia ini ada banyak pengalaman yang sulit dihadapi oleh seseorang dalam kehidupan yang terus menjalani hidup ini, meskipun ada saatnya terhenti oleh peristiwa atau situasi yang tidak dapat dipecahkan pada saat itu.²

Manusia Indonesia abad ke-21 tidak boleh diombang-ambing oleh arus deras globalisasi. Manusia Indonesia harus dapat menentukan sikapnya untuk memilih, bertindak dan bertanggung jawab sebagai seseorang agar dia berguna

¹ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 147.

² Prayitno, *Konseling Integritas*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2013), h. 4.

dalam masyarakat, negara, dan kehidupan era globalisasi dewasa ini.³ Jika globalisasi adalah suatu keniscayaan, maka pendidikan mau tidak mau harus dikontekskan dengan piranti-piranti globalisasi tersebut. Sebab, pendidikan adalah sarana untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan demikian, pendidikan sudah seharusnya memiliki kepentingan untuk membentuk SDM yang siap bergulat dan bertarung untuk menghadapi arus deras globalisasi yang menindas dan mencengkram.⁴

Oleh karena itu, saat ini pemerintah menggalakan berbagai usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya dan hal ini ditempuh secara bertahap dengan berbagai macam kegiatan terutama dalam bidang pendidikan.

Agama Islam pun sangat mengutamakan pendidikan. Bahkan, orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Mujadalah ayat 11:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Begitu pentingnya pendidikan, Al-Quran memberikan gambaran bahwa dalam kondisi suatu negara dalam keadaan perang sekalipun, proses pendidikan harus tetap dilaksanakan.⁵ Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Taubah ayat 122.

³ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, *op. cit.*, h. 148.

⁴ Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), Cet. II, h. iii-iv.

⁵ Mahyuddin Barni, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2011), h. 18.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat di atas menggarisbawahi pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarkan informasi yang benar. Ia tidak kurang penting dari upaya mempertahankan wilayah. Bahkan, pertahanan wilayah berkaitan erat dengan kemampuan informasi serta keandalan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia.⁶

Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah merdeka lebih dari 70 tahun. Cita-cita kemerdekaan yang digagas oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan tonggak-tonggak perjuangan pergerakan nasional tersebut.⁷ Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan mendirikan Republik ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kaitan ini pemerintah menyusun suatu sistem pendidikan nasional yang dewasa ini telah dapat diwujudkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 5, h. 290.

⁷ Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, *op. cit.*, h. 3.

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁸

Berdasarkan rumusan di atas, jelas bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai upaya dalam mengembangkan semua potensi yang dimiliki seseorang. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya, akan tetapi pendidikan juga mampu membentuk watak dan kepribadian manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani sehingga dapat membawa masyarakat bangsa dan negara ke arah yang lebih maju.

Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Purwanto dalam buku *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* bahwa:

Di dalam Tap MPR No. II/MPR/1988 tujuan pendidikan lebih ditekankan pada “Peningkatan kualitas manusia Indonesia”. Hal ini pun didasarkan atas tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia yang pada saat itu sebagai negara berkembang harus berpacu dengan negara-negara lain dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang sangat diperlukan dalam kehidupan dunia yang sedang mengalami era industrialisasi, informasi, dan globalisasi.⁹

Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hal ini tentu tidak terlepas dari proses pendidikan yang mantap. Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab

⁸ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-undang Sisdiknas*, (Jakarta: Ditjend Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003), h. 37.

⁹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. XXI, h. 37.

bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan usaha yang optimal dari berbagai pihak dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik.

Sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga merupakan lembaga yang melaksanakan pendidikan secara formal. Sekolah didirikan masyarakat atau negara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dalam memberi bekal persiapan hidup bagi peserta didik. Untuk mempersiapkan peserta didik agar hidup dengan cukup bekal kepandaian dan keterampilan dalam masyarakat yang modern dengan kebudayaan yang tinggi seperti sekarang ini, peserta didik tidak cukup hanya menerima pendidikan dan pengajaran dari keluarga saja, tetapi juga harus mendapatkan pendidikan dari sekolah-sekolah.¹⁰ Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga harus berusaha memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler, dan bidang pembinaan peserta didik (bimbingan dan konseling). Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan pengajaran dengan mengabaikan bidang bimbingan mungkin hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek psikososiospiritual.¹¹

¹⁰ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, *op. cit.*, h. 124.

¹¹ Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa arus deras globalisasi yang sedang melanda seluruh dunia membawa individu ke dalam situasi kebingungan karena dia menghadapi dunia yang sedang berkembang dengan cepat. Kondisi ini berdampak pula pada kehidupan individu maupun sebagai anggota masyarakat. Individu akan dihadapkan pada situasi yang penuh dengan perubahan-perubahan yang serba cepat dan kompleks. Berbagai persoalan yang dihadapi seiring dengan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya: jenis dan pola kehidupan, hubungan sosial antarindividu, kesempatan memperoleh pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan, persaingan antarindividu, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, individu (tidak terkecuali peserta didik) dituntut untuk mampu menghadapi berbagai masalah seperti kemampuan menyesuaikan diri (adaptasi), perencanaan dan pemilihan pendidikan, perencanaan dan pemilihan pekerjaan, masalah hubungan sosial, keluarga, masalah-masalah pribadi, dan lain sebagainya. Tidak semua individu mampu mengatasi masalahnya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, maka individu memerlukan pembimbing dan mendapat bimbingan (bantuan) dari pembimbing.¹² Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah bertanggung jawab mendidik dan

¹² Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 3.

menyiapkan peserta didik agar mampu (berhasil) menyesuaikan diri di dalam masyarakat dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Hadirnya layanan bimbingan dan konseling dalam lembaga pendidikan formal (sekolah atau madrasah) merupakan upaya dalam mencapai perwujudan manusia yang memiliki kepribadian optimal.¹³ Oleh karena itu, bimbingan dan konseling dalam lembaga pendidikan formal merupakan suatu keniscayaan.

Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah atau madrasah tidak akan berhasil secara baik apabila tidak didukung oleh penyelenggaraan bimbingan secara baik pula.¹⁴

Guru pembimbing (konselor) sebagai pelaksana utama bimbingan dan konseling tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa di sekolah dan madrasah. Guru pembimbing (konselor) akan memerlukan orang lain dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan perkataan lain, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah melibatkan banyak orang.¹⁵ Keberhasilan penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah bergantung kepada kerjasama antara pihak kepala sekolah, guru pembimbing (konselor), guru-guru, dan personil

¹³ *Ibid.*, h. 5.

¹⁴ *Ibid.*, h. 12.

¹⁵ *Ibid.*, h. 276.

sekolah lainnya.¹⁶ Hal ini berarti personil sekolah mempunyai porsi-porsi tersendiri dalam implementasi bimbingan dan konseling di sekolah.

Untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah, diperlukan adanya pengorganisasian kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang baik. Pengorganisasian yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja, dan pola kerja atau mekanisme kerja kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling akan berdaya guna dan berhasil guna jika diimbangi dengan organisasi yang baik. Jika organisasi berjalan dengan baik, berarti ada suatu koordinasi, perencanaan, sasaran yang cukup jelas, kontrol, serta kepemimpinan yang berwibawa, tegas, dan bijaksana.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang dilakukan untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional melibatkan semua pihak. Peran aktif dari guru pembimbing (konselor) yang merupakan pelaksana utama layanan bimbingan dan konseling serta peran seluruh personil sekolah lainnya akan mampu mewujudkan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang optimal.

Berdasarkan gambaran teoretis yang telah dipaparkan di atas serta berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan Penulis di Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Intan Kabupaten Banjar (selanjutnya penulisan akan disingkat menjadi MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar), Penulis menemukan fakta terkait hal ini yang diperoleh dari pernyataan Bapak M. Syafwani, S. Pd. selaku guru

¹⁶Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling, op.cit.*, h. 55.

¹⁷Dewa Ketut Sukardi dan Desak P.E. Nila Kusmawati, *Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 40.

bimbingan dan konseling yang juga merangkap jabatan sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan . MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Keterangan yang didapatkan berkenaan dengan peran personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar, di antaranya adalah adanya kerjasama wali kelas dan guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan kegiatan *home visit* (kunjungan rumah), kolaborasi dalam penanganan siswa, dan kerjasama dengan staf Tata Usaha dalam menghimpun data pribadi siswa. Mengingat jumlah keseluruhan peerta didik di madrasah ini berjumlah 253 orang dengan 1 orang guru bimbingan dan konseling, maka peranan personil sekolah lainnya sangat diperlukan agar pelayanan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar berjalan optimal. Mengetahui pernyataan tersebut, Penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mempelajari lebih dalam mengenai peranan personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar melalui sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul: **Tugas dan Tanggung Jawab Personil Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Intan Kabupaten Banjar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana tugas dan

tanggung jawab personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah ini merupakan target yang hendak dicapai melalui rangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul skripsi ini, maka Penulis terangkan beberapa istilah tentang judul dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tugas berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.¹⁸ Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.¹⁹ Menurut *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, bertanggung jawab berarti menanggung segala apa yang terjadi

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. III, h. 964.

¹⁹ *Ibid.*, h. 899.

yang berhubungan dengan kewajiban atau perbuatannya.²⁰ Tugas dan tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini Penulis fokuskan pada peranan saja. Adapun menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peranan berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²¹

Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian dari tugas utama yang sudah ditentukan dan harus dilaksanakan untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam hubungannya dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar.

2. Personil Sekolah

Menurut *Kamus Ilmiah Populer*, kata personil berarti anggota, pegawai, personal.²² Jadi, personil sekolah adalah anggota, pegawai, atau personal yang berada di sekolah. Personil sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota atau pegawai non profesional bimbingan dan konseling yang berada di satuan pendidikan MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar yang tidak mengemban tugas sebagai pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling (guru pembimbing/konselor), meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan (merangkap jabatan sebagai guru bimbingan dan konseling), guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf tata usaha (staf administrasi).

²⁰ Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, tth), h. 193.

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit.*, h. 667.

²² Pius A Partanto dan M. Dahlan AL Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 585.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²³ Pelaksanaan yang dimaksud di sini adalah proses, cara, dan perbuatan melaksanakan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara sistematis dan sudah direncanakan terlebih dahulu di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar.

4. Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri.²⁴ Bimbingan dan konseling yang dimaksud di sini adalah bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar.

Jadi, yang dimaksud Penulis dengan Tugas dan Tanggung Jawab Personil Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sini adalah bagian dari tugas utama yang sudah ditentukan dan harus dilaksanakan serta dipertanggung jawabkan oleh personil sekolah non profesional bimbingan dan konseling yang terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah (sekaligus sebagai guru bimbingan dan konseling), guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf tata usaha

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet ke-3, h. 627.

²⁴ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi*, *op. cit.*, h 26.

(staf administrasi) dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun praktis.

1. Kegunaan secara Teoretis

- a. Sebagai bahan informasi, masukan, serta pokok pikiran terkait tugas dan tanggung jawab personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.
- b. Bahan kajian bagi guru bimbingan dan konseling dan seluruh tenaga kependidikan dalam mengefektifkan bimbingan dan konseling di sekolah.
- c. Sebagai wawasan bagi Penulis tentang tugas dan tanggung jawab personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dan sebagai informasi serta perbandingan bagi mereka yang ingin mengangkat dan ingin mengadakan penelitian mengenai permasalahan yang serupa.
- d. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling.
- e. Memperkaya bahan kajian atau khazanah keilmuan tentang pendidikan khususnya bimbingan dan konseling pada perpustakaan

pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin

- f. Sebagai bahan bacaan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi personil sekolah terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.
- b. Sebagai referensi dan rujukan bagi personil sekolah dan khususnya guru bimbingan dan konseling dalam memperbaiki dan meningkatkan layanan bimbingan dan konseling khususnya dalam hal kerjasama maupun kolaborasi antar personil sekolah pada pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar.
- c. Sebagai referensi dan rujukan bagi pihak sekolah, khususnya bagi konselor sekolah atau madrasah dalam memperkaya keilmuannya untuk mengembangkan lebih lanjut kerjasama dan kolaborasi antar personil sekolah lainnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan bimbingan dan konseling.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoretis, yang berisi tentang teori yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, meliputi pengertian bimbingan dan konseling, keterkaitan antara bidang pelayanan bimbingan dan konseling dan bidang-bidang lainnya, program layanan bimbingan dan konseling, tugas dan tanggung jawab personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan tugas dan tanggung jawab personil sekolah dalam penanganan siswa bermasalah dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, meliputi simpulan dan saran-saran.